

BAB III

KRISIS POLITIK PARA PENGUASA DI TIMUR TENGAH DAN PROSES PERUBAHAN MENUJU DEMOKRASI

Menghadapi abad ke-21, kawasan Timur Tengah selalu diliputi dengan berbagai gerakan radikalisme. Salah satunya muncul gerakan rakyat menggugat atas kepemimpinan nasional mereka. Peristiwa itu dikenal sebagai kebangkitan dunia arab atau Musim Semi Arab, dalam bahasa Arab “*Ath-Thawrat al’Arabiyyah*” secara Harfiah Pemberontakan Arab. Samuel P. Huntington, seorang ilmuwan politik Amerika, pernah menulis tesis mengenai tahapan gelombang demokratisasi. Gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rezim non-demokratis ke rezim demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya signifikan.³¹

Dalam bab ini, Penulis akan menerangkan mengenai Krisis Politik Para Penguasa di Timur Tengah dan Proses Perubahan Menuju Demokrasi dimulai dari: Kronologis Peristiwa Arab Spring, Kebangkitan Politik Islam di Timur Tengah, Masa Depan Politik Arab Saudi dan Tantangan Pemerintahan Baru di Timur Tengah.

A. Kronologis Peristiwa Arab Spring

Fenomena “*Arab Spring*” merupakan istilah lain yang diberikan terhadap Revolusi Dunia Arab dalam bahasa arab disebut “*al-Thawrat al-`Arabiyyah*”. Merupakan serangkaian peristiwa gelombang revolusi, demonstrasi dan protes dalam skala besar yang dimulai di dunia arab pada tanggal 18 Desember 2010. Dalam peristiwa Arab Spring, para penguasa diktator dipaksa untuk menurunkan jabatan mereka di berbagai negara seperti: Tunisia, Mesir, dan Libya. Pemberontakan sipil

³¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Grafiti Press, 1993., Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan sosial dan perubahan politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

bermunculan di Bahrain dan Suriah. Aksi protes dalam skala besar pecah di Iraq, Yordania, Kuwait, Maroko dan Sudan. Aksi Protes dalam skala kecil meletus di Arab Saudi, dan Oman.

Perang saudara di Libya dan pemberontakan di Mali merupakan pelopor terjadinya gelombang Arab Spring di Afrika Utara, dan menular ke negara Libya dan Lebanon. Para masyarakat yang melakukan kegiatan revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara menggunakan berbagai macam teknik perlawanan terhadap kekuasaan diktator absolut di negara mereka masing-masing seperti: demonstrasi, penyerangan langsung melawan pasukan pro-pemerintah, pawai dan menggalang massa melalui media jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di negara-negara yang mengalami revolusi dunia arab mendapat perlawanan keras baik itu dari pasukan pemerintah maupun masyarakat yang cenderung berpihak pada penguasa. Adanya kekuasaan diktator, monarki absolut, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi (dalam dokumen kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks), pengangguran, kemiskinan, serta naiknya harga pangan merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena Arab Spring.

Pemicu utama dalam terjadinya peristiwa Arab Spring berasal dari satu orang yang bernama Sidi Bouzid yang kemudian di susul oleh Mohammed Bouzizi yang membakar diri sendiri sebagai bentuk protes terhadap kekuasaan diktator di Tunisia. Peristiwa ini disaksikan oleh masyarakat di negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara yang kemudian memicu revolusi dunia arab di Aljazair, Yordania, Yaman dan Mesir. Peristiwa ini dimulai pada hari Jumat yang menjadi hari suci bagi umat Islam yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya dalam melaksanakan revolusi.

Pada bulan September 2012, sebanyak empat penguasa diktator telah diturunkan dari jabatannya, presiden Tunisia Zine El Abidin Ben Ali pergi ke Arab Saudi mencari suaka politik pasca revolusi Tunisia pada bulan Januari 2011. Di Mesir, presiden Husni Mubarak mengundurkan diri dari

jabatannya pada tanggal 11 Februari 2011 setelah revolusi Mesir berlangsung selama 18 hari, mengakhiri kekuasaannya yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Kemudian penguasa Libya Moammar Kadafi dipaksa mundur pada tanggal 23 Agustus 2011 setelah pihak oposisi Dewan Transisi Nasional (NTC) mengambil alih wilayah Bab Al-Azizia. Kadafi terbunuh pada tanggal 20 Oktober 2011 di Sirte kota kelahirannya setelah pasukan oposisi mengambil alih kota tersebut. Kemudian presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang mundur dari kekuasaannya setelah menandatangani perjanjian pemindahan kekuasaan Abdul Al-Rab Mansur Al-Hadi.

Bahrain negara monarki kecil dikawasan teluk mulai digunjang aksi protes pada 15 Februari 2011, selang beberapa hari pasca Mubarak mengundurkan diri. Bahrain memiliki sejarah panjang ketegangan antar penguasa Sunni dengan Mayoritas Syiah yang menuntut hak politik dan ekonomi yang lebih besar. Sekitar sepuluh ribu demonstran yang digalang oleh kelompok Syiah tumpah-ruah disepanjang jalan. Untuk mengendalikan stabilitas keamanan, keluarga kerajaan Bahrain dibantu oleh Intervensi militer Arab Saudi. Pemerintah menangkap para demonstran dan para aktivis lainnya. Kondisi yang berbeda terjadi di Suriah, Negara multi religius yang merupakan aliansi Iran tidak luput digunjang *Arab Spring*. Suriah dikuasai oleh Rezim yang represif dan memiliki peran vital dalam posisi geopolitik di Timur Tengah. Massa aksi protes utamanya dimulai pada Maret 2011 di beberapa kota, kemudian menyebar luas keseluruhan penjuru negeri. Keberutalan Rezim memantik respon bersenjata dari Oposisi, dan pada pertengahan tahun 2011, Oposisi mengorganisir pembentukan tentara Oposisi bernama *Free Syrian Army*. Namun dalam perjalanannya, pada akhir 2011 Suriah terjerumus dalam perang sipil melawan kelompok minoritas Syiah Alawiyah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad.

Pasca di Suriah, *Arab Spring* menghantam Maroko pada 20 Februari 2011, ketika itu ribuan massa berkumpul di ibu kota Rabat dan juga diberbagai kota lainnya menuntut lebih besar keadilan sosial dan pembatasan kekuasaan raja

Mohammad IV. Hal itu direspon oleh raja dengan menawarkan amandemen konstitusi yang kemudian akan menanggukkan sebagian kekuasaannya dan mengadakan kembali pemilihan parlemen. Selanjutnya, gelombang *Arab Spring* di Yordania mencapai momentumnya pada akhir januari 2011, ketika itu kelompok Islam, kelompok kiri dan aktivis pemuda melakukan aksi protes menuntut perbaikan kondisi hidup dan korupsi. Hampir mirip dengan Maroko, sebagian besar rakyat Yordania menginginkan reformasi, dari pada menghapus monarki. Sebagai hasilnya, raja mengatur untuk melakukan perubahan sistem politik serta merubah sistem yang ada dalam pemerintahan. Tercatat dari dimulainya gejolak Arab Spring diakhir 2010 hingga saat ini, terdapat ada 18 negara yang mengalami Fenomena Arab Spring.³²

B. Kebangkitan Politik Islam di Timur Tengah

Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi atau *The Arab Spring* yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara telah merubah peta politik di kawasan tersebut menjadi lebih demokratis. Beberapa negara seperti Tunisia, Mesir dan Maroko sukses menggelar pemilu pertamanya. Yang menarik dalam perayaan pesta demokrasi tersebut adalah munculnya partai-partai Islam sebagai kekuatan baru di pentas politik Regional. Tunisia merupakan negara pertama yang menyelenggarakan pemilu pasca revolusi. Hasil akhir perhitungan suara menunjukkan partai An-Nahdhah memperoleh suara signifikan dengan meraih 89 kursi dari 217 kursi yang diperebutkan mengungguli partai lainnya seperti Partai Kongres (CPR) yang memperoleh 29 kursi dan Ar-Ridha Asy-Sya'biyyah dengan 26 kursi. An-Nahdhah merupakan partai berasaskan Islam yang didirikan oleh Rashid Al-Ghannushi pada tahun 1981 terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada

³² Kebangkitan Dunia Arab,
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_dunia_Arab, diakses
20/09/17 pukul 23:00

tahun 1928. Disamping itu agenda politik partai An-Nahdhah yang sesuai dengan agenda revolusi Tunisia dalam memberantas korupsi dan pemulihan krisis ekonomi menjadikan partai ini banyak dipilih rakyat selain daripada coraknya yang Islami namun moderat.

Sama halnya dengan yang terjadi di Tunisia, Mesir pun menggelar pemilu yang diselenggarakan sejak 28 November 2011. Hasil akhir pemilu untuk memilih majelis rendah (Majlis Asy-Sya'biyyah yang diumumkan Komisi Pemilu Mesir pada 21 Januari 2012 menunjukkan kemenangan partai-partai Islam. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang merupakan representasi dari Ikhwanul Muslimin memperoleh 235 kursi atau 47,18 persen. Partai An-Nur dari kalangan Salafi memperoleh 121 kursi. Sedangkan partai Al-Wafd yang berhaluan liberal hanya memperoleh 42 kursi. Sementara partai aliansi Mesir meraih sekitar 33 kursi. Keberhasilan FJP tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah politik mesir sejak gerakan Ikhwanul Muslimin dilarang terjun dalam kancah politik. Dengan kemenangan tersebut FJP pun mempunyai peluang untuk menggolkan Khairat As-Satir, tokoh yang diusungnya sebagai presiden Mesir pada Pemilu presiden bulan Mei mendatang.

Berbeda dengan yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang menyelenggarakan pemilu setelah lengsernya rezim, di Maroko pelaksanaan pemilu berlangsung tanpa adanya pergantian kepemimpinan. Setelah terjadinya protes besar-besaran yang terjadi di beberapa kota pertengahan Februari 2011, Raja Muhammad VI langsung merespons tuntutan para demonstran untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu dan melakukan amandemen konstitusi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam politik. Sejak penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1963, partai Islam belum menunjukkan kekuatan yang signifikan. Namun, pada penyelenggaraan pemilu 25 November 2011, partai Islam mulai menunjukkan kekuatannya. Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang mewakili kelompok Islam berhasil memperoleh suara terbanyak dengan memperoleh 107 kursi

atau 27 persen dari total 395 kursi menggeser dominasi partai Istiqlal yang beraliran nasionalis. Dengan kemenangan tersebut, pemimpin PJD Abdelillah Benkirane menjadi perdana menteri untuk pertama kalinya. Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) merupakan partai Islam moderat yang didirikan pada tahun 1967.

Begitu juga di Libya, Suriah, Bahrain dan Yaman walaupun pemilu di negara-negara tersebut belum diselenggarakan, namun indikasi menguatnya pengaruh Islam sudah nampak kepermukaan. Gerakan-gerakan Islam serempak menyatakan akan menetapkan Syariah Islam sebagai hukum negara. Gerakan Ikhwanul Muslimin di Libya misalnya yang belum lama ini menggelar kongres, menganjurkan para anggotanya untuk bergabung dengan partai yang menjadikan Islam sebagai tujuannya.

Kemenangan partai-partai Islam di beberapa negara Timur Tengah tersebut tidak terlepas dari peran para aktivisnya yang berhasil meraih simpati rakyat setelah sebelumnya kerap mendapatkan tindakan kekerasan dan intimidasi para rezim. Pendiri Partai An-Nahdhah di Tunisia misalnya Rashid Al-Gannushi pernah mengasingkan diri ke Eropa setelah rezim Ben Ali melarang partai An-Nahdhah pada 1981, sampai dapat muncul kembali setelah terjadinya revolusi tepatnya pada 1 Maret 2011. Begitu juga di Libya Mesir, Suriah, Bahrain dan Yaman gerakan Islam senantiasa menjadi sasaran kekerasan rezim yang berkuasa. Namun, tindakan represif para rezim yang didukung Barat tersebut justru dimanfaatkan kelompok Islam untuk melakukan restruktur organisasi dan kegiatan sosial, sehingga gerakan tersebut muncul dan menjadi kekuatan penting seiring dengan proses demokratisasi di Timur Tengah dan adanya kekosongan kepemimpinan dikawasan tersebut.

C. Masa Depan Politik Arab Saudi

Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang derajat powernya tinggi dimata internasional, namun ternyata masih menyimpan banyak permasalahan domestik tersendiri

seperti kesenjangan ekonomi, instabilitas politik dan kepemimpinan monarki yang membelenggu. Sehingga proses restrukturisasi harus dilakukan dalam bidang ekonomi dan politik, yang dalam hal ini dibantu oleh Bangsa Barat terutama Amerika Serikat.³³ Titik awal instabilitas terjadi pasca krisis finansial pada tahun 1993-1994 yang menggempur Raja Al-Saud melawan berbagai aksi represif dari aktivis dan oposisi.

Oposisi kemudian membentuk *Committee for the Defense of Legitimate Rights (CDLR)* yang dibentuk di London pada 1994 yang bertujuan menciptakan struktur antara pemerintahan dan oposisi anti kekerasan.³⁴ Namun upaya bungkam dari oposisi terkalahkan oleh krisis finansial yang menuntut reformasi di bidang sumber daya alam, politik, ekonomi, edukasi dan perlakuan oposisi. Dependensi minyak merupakan salah satu kondisi lemahnya perekonomian Arab, karena resesi ekonomi akan tergantung pada harga minyak. Misalnya tahun 1987 ketika harga minyak melorot, penerimaan negara menurun drastis dari 42,6 miliar dolar ke titik 20 miliar dolar (Kanovsky, 1998: 125 dalam Champion, 1999: 3). Merespon hal ini dibentuklah *Saudi Five-Year Development Plan* yang bertujuan memangkas defisit negara melalui bantuan IMF, yang ternyata mengalami kegagalan akibat korupsi, lemahnya birokrasi, nasionalisme serta legitimasi politik.³⁵

Saudi Basic Industries Corporation atau SABIC dibentuk untuk memperkuat *sector industry* dan ekonomi melalui training dan perluasan lapangan kerja. FDI dan pembentukan kerjasama yang diciptakan melalui regionalisme *Gulf Cooperation Council (GCC)* juga menjadi salah satu strategi restrukturasi ekonomi. Di sektor politik, pemimpin akan berupaya untuk terus mempertahankan tampuk kepemimpinan melalui relasi yang dibentuk dengan akademisi,

³³ Daryl Champion, "The Kingdom of Arab Saudi: Elements of Instability within Stability", dalam *Middle East Review of International Affairs*, November 1999, hal. 3

³⁴ *Ibid.*, hlm.2

³⁵ *Ibid.*, hlm.4

pembisnis dan politikus. Ditambah dengan pengetatan sirkulasi dalam masyarakat dan apparatus negara sebagai pemantau informasi yang ada di masyarakat.

Fragmentasi pihak oposisi di negara Arab diawali dari pemisahan CDLR pada tahun 1996, yang akhirnya menjadi kubu CDLR dipimpin oleh Muhammad Al-Mas'ari dan pemimpin kedua kemudian mendirikan *Movement for Islamic Reform in Arabia* di London, Osama bin Laden dalam AQIM juga terlibat dalam pengeboman Khobar dan Dahrhan dan menekankan ikut campurnya teroris dalam oposisi kerajaan Arab (Saad al-Fagih pers., 1998 dalam *Champion*, 1999: 8). Kelompok-kelompok seperti Hambali dengan Wahabi, Sunni dan Shi'a, Hijaris dan Najdis, antara urban, rural dan kaum nomaden atau antara masyarakat tradisional konservatif dengan liberal modern juga mewarnai heterogenitas kultur politik Arab Saudi. Fragmentasi ini mempertanyakan relevansi monarki absolute kerajaan, oleh karena itu dibentuk sebuah lembaga yang menjadi jembatan aspirasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui *Consultative Council* atau Majelis al-Shura pada tahun 1993, yang kemudian menjadi langkah awal menuju modernisasi pemerintahan di Arab. Namun bukan sama sekali sebagai hal yang mampu mempengaruhi sebuah keputusan yang dipegang legitimasi sepenuhnya oleh raja Al-Saud dan keluarganya. Forum ini digelar sebagai bentuk minimalis terhadap resiko politik dan representasi *input* suara publik (British Ambassador to Arab Saudi, 1998 dalam *Champion*, 1999: 10). Namun adanya wadah ini belum menyelesaikan persoalan domestic. Perilaku pangeran penerus Raja Abd Al-Aziz justru cenderung mengeksploitasi sumber daya minyak dan mineral demi kepentingan pribadi, hal inilah yang menumbuhkan delegitimasi rakyat terhadap raja Arab Saudi. Dan hal ini mempengaruhi sektor politik, *society*, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi.³⁶

³⁶ Nimrod Raphaeli, "Arab Saudi: A Brief Guide to Its Politics and Problems", dalam *Middle East Review of International Affairs*, November 7, 2003, hlm. 3

Masalah lain yang turut menyumbang tantangan bagi Arab Saudi ialah persoalan ledakan penduduk hingga 4,2% per tahun dan merajalelanya pengangguran hingga 30%, dan sebaliknya pekerjaan dikuasai oleh para imigran. Sehingga dana kesehatan dan pengaturan kependudukan untuk mengontrol laju pertumbuhan dan sirkulasi penduduk ini dikurangkan lebih besar. Kemudian permasalahan konstitusi monarki yang akhirnya menciptakan sistem oligarki oleh para putra Al-Saud seperti Raja Faisal dan Raja Khalid menimbulkan banyaknya ketidakadilan yang terjadi di berbagai sector. Dan yang lebih masif adalah suara oposisi yang makin kencang menghantam pemerintahan kerajaan berkaitan dengan kekecewaan atas kegagalan perombakan ekonomi, ruang publik serta sistem yudisial seperti kasus Muhammad bin Abdul Aziz Al-Sheikh sebagai “*The Minister of Economic Affairs*” dan surat pada bulan April tahun 2003 sebanyak 100 politikus dan akademisi.³⁷

Sedangkan, menurut pendapat bangsa Barat dunia Jazirah Arab tidak memiliki *civil society* yang merupakan elemen utama dalam aktivitas pembangunan, publikasi, penggabungan serta jajak pendapat secara formal, yang ada hanyalah oposisi informal saja. Hal ini disebabkan adanya larangan keras terhadap pergerakan oposisi.³⁸ Dalam hal ini, kemudian kontes politik yang terjadi sangat khas karena adanya *rulling family* dalam sistem oligarki tersebut. Masuknya pengaruh Barat membawa isu sektarianisme malambung, dalam kondisi monarki maka hanya identitas agama yakni Islam yang menjadi elemen pemersatu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Arab Saudi berada dalam kondisi dilema, dimana di satu sisi terdapat banyak protes atas sistem monarki dewasa ini dan menuntut demokrasi, namun kapabilitas negara ini masih berkuat pada demokrasi prosedural yang belum mencerminkan kepribadian

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Caroline Montagu, “Civil Society and the Voluntary Sector in Arab Saudi”, dalam *Middle East Journal*, 2010, 64 (1): 67-84

bangsa Arab, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah memperluas ruang *civil society* secara informal dengan cara *Pertama*, melakukan pengembangan kualitas hidup masyarakat Arab Saudi melalui manajerialisasi, penggunaan teknologi mesin industri, ekonomi, dan literatur pendidikan. *Kedua*, mengembangkan organisasi-organisasi sosial dengan pelayanan yang spesifik seperti ketidakmampuan fisik dan mental. *Ketiga*, menjaga nilai-nilai tradisional (hukum Islam) tetap eksis dalam modernisasi seperti pendirian Departemen Pajak dan Zakat. *Keempat*, aktif menyuarakan hak-hak perempuan dan mengimprovisasi kesetaraan gender dalam kehidupan sosial bahkan politik jika mungkin.

Setelah setahun gelombang revolusi atau yang lebih dikenal dengan “Arab Spring” menerjang negara-negara Timur Tengah. Satu persatu para diktator di kawasan tersebut tumbang akibat protes warga yang menghendaki adanya perubahan baik sosial, politik dan ekonomi. Dimulai dari rezim Ben Ali di Tunisia yang telah berkuasa selama 23 tahun, lalu disusul dengan tumbangannya Husni Mubarak di Mesir yang telah berkuasa selama kurang lebih 33 tahun. Kemudian revolusi merambah ke Libya dan berhasil meruntuhkan rezim Khadafi yang telah berkuasa selama 33 tahun. Hingga akhirnya gelombang revolusi dapat melengserkan rezim Ali Abdullah Saleh di Yaman. Bahkan, angin revolusi tersebut disinyalir akan berhembus lebih kencang lagi sampai menerpa Suriah, Jordania dan Bahrain. Berbagai media massa menyebut fenomena tersebut sebagai sebuah gelombang demokratisasi baru yang pernah melanda dunia. Seorang pakar politik Internasional, Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the late twentieth century* (1991, 17), melukiskan fenomena demokratisasi yang pernah melanda dunia.

Gelombang pertama (1828-1926) dipicu dengan terjadinya revolusi industri, revolusi Perancis dan revolusi Amerika Serikat. Gelombang demokratisasi tersebut akhirnya berhasil mempengaruhi negara-negara di Eropa Timur dan Selatan. Gelombang kedua (1943-1962), ditandai dengan

kemenangan sekutu atas Jerman, Italia dan Jepang. Sedangkan gelombang ketiga dimulai ketika terjadinya revolusi bunga di Portugal pada tahun 1974, yang kemudian menjalar ke beberapa negara, seperti Yunani, Spanyol, Amerika Latin dan Asia. Namun, pada saat dunia tengah dilanda gelombang demokratisasi, Timur Tengah justru luput dari gelombang demokratisasi tersebut dimana mayoritas negara masih dipimpin oleh para diktator, baik dari kalangan militer maupun partai tunggal. Pada saat itu gerakan Islam belum muncul sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan, bahkan kelompok ini kerap mendapat tekanan dan intimidasi dari para rezim. Pasca revolusi, dunia Arab yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai peluang menjadi kawasan yang demokratis. Bahkan, berdasarkan laporan *Economist Intelligence Unit* (EIU), pada tahun 2011 negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Maroko, Libya dan Yaman mengalami peningkatan indeks demokrasi secara signifikan.

D. Tantangan Pemerintahan Baru di Negara Kawasan Timur Tengah

Revolusi 2011 yang melanda berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara telah mengguncang perekonomian dikawasan tersebut, bahkan krisis politik yang berkelanjutan di Libya, Suriah, Bahrain, Yaman maupun Teluk Persia bisa berdampak terhadap perekonomian global. Akibat krisis politik tersebut harga minyak sempat menyentuh level US\$ 120-150/barel. Kenaikan harga minyak tersebut merupakan konsekuensi dari krisis politik yang terjadi, mengingat Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar dan rute pelayaran kunci minyak dan gas dunia. Disamping itu, pergolakan tersebut menimbulkan kekhawatiran kalangan investor global hingga memicu pergerakan bursa saham. Bursa-bursa saham dunia pun menurun akibat semakin memanasnya iklim politik di Timur Tengah. Memang, sebelum terjadinya revolusi, Timur Tengah merupakan kawasan kaya jika dilihat dari Produk Domestik Bruto (GDP) dan produksi minyaknya (Arab Human

Development Report, 2002). Belakangan, kebijakan-kebijakan rezim yang tidak pro-rakyat seperti pengurangan subsidi menjadikan semakin mahal harga komoditas dan angka pengangguran mengalami peningkatan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menunjukkan bahwa sejak 2009, angka kemiskinan di Timur Tengah semakin meningkat. Di Mesir angka kemiskinan mencapai 40 persen atau sekitar 30,8 juta jiwa. Sedangkan di Suriah, Yordania dan Yaman kemiskinan meningkat hingga mencapai 33-45 persen (Adnan Khan, 2011). Angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintahan baru di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pasca pemilu, pemerintahan baru yang didominasi kelompok Islam memilih untuk mengedepankan agenda reformasi di berbagai bidang terutama ekonomi. Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir misalnya, mendukung terciptanya pasar bebas dan akan bekerjasama berbagai pihak dalam rangka mengembangkan jaringan bisnis dan pariwisata Timur Tengah. Disamping itu, petinggi partai An-Nahdhah Tunisia yang menjadi perdana menteri, Hamadi Jebali menyatakan pemerintahan baru yang dipimpinnya akan fokus pada pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Sementara Abdelilah Benkirane sebagai pemimpin baru Maroko berjanji akan meningkatkan ekonomi negaranya termasuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan upah bagi buruh, menciptakan stabilitas nasional. Demikian halnya pemerintahan baru Libya pimpinan Abdurrahim Al-Kib menyatakan siap membentuk negara demokratis dan akan bekerjasama dengan Uni Afrika dan negara-negara Arab lainnya untuk memulihkan perekonomian negara terutama dalam melanjutkan program-program *African Economic Community (AEC)*.